

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Mei 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJA SAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JAMAL  
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA  
3. NHK : 709456

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, FORD DOUBLE CABIN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA RX-KING Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	98.460.663
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	213.460.663
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	61.350.400
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	152.110.263

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Desember 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.